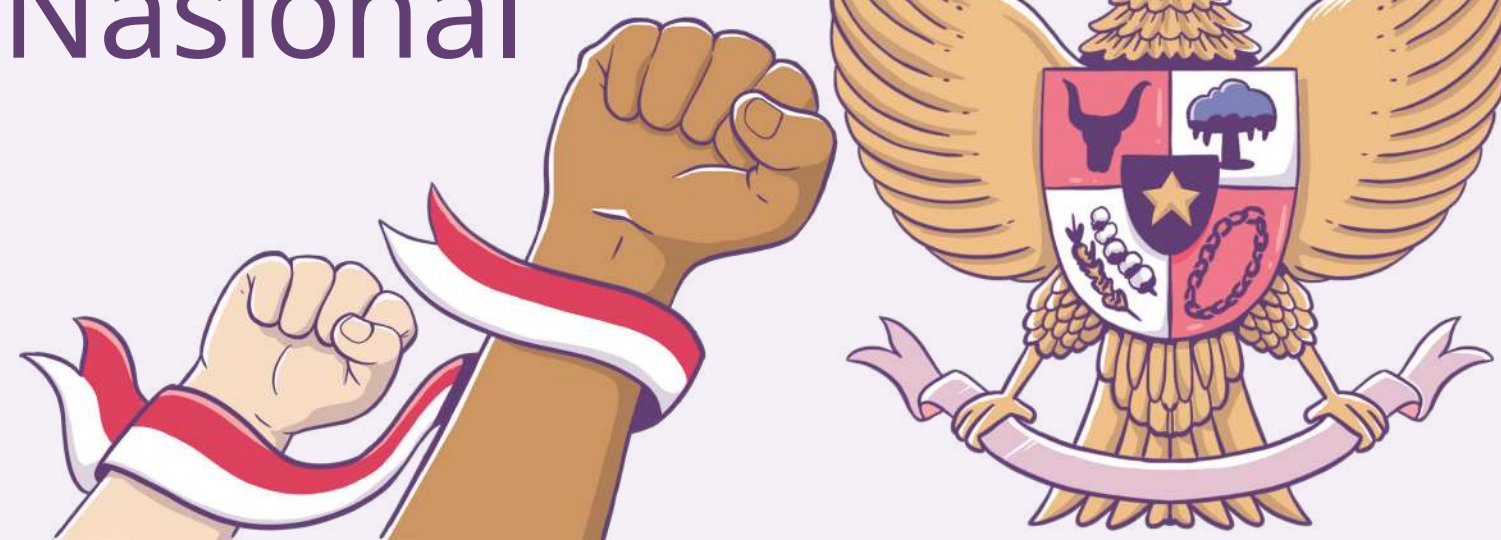




Keadilan bagi Perempuan dan Anak Perempuan

AIPJ2 mendukung mitra untuk memperluas diskusi pengembangan kebijakan dan rencana implementasi kebijakan guna melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Topik diskusi kebijakan antara lain mencegah perkawinan anak, menghapus diskriminasi terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, dan memastikan dukungan keluarga pasca perceraian.

Pengembangan Kebijakan Nasional



Pencegahan Perkawinan Anak

Bappenas, MAMPU, UNICEF

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak | 2020

Ditjen Badilag MARI, KPPPA

Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perceraian Nomor 036/Setmen.Birohh/KL.01/102022 dan Nomor 4027/DjA/HM.00/10/2022

Pokja Perempuan dan Anak MARI, IJRS, Rumah KitaB

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Yayasan PEKKA, Ditjen Badilag MARI, DPPKBP3A Cianjur, DP3AP2KB Lombok Tengah, DP3A Situbondo

Memorandum of Understanding antara Badan Peradilan Agama dan Yayasan PEKKA terkait pemberian akses kepada paralegal PEKKA sebagai pengguna register E-Court Pengadilan Agama



Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Pokja Perempuan dan Anak MARI, IJRS

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Yayasan Bakti

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung RI, IJRS

Pedoman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Pokja Akses Keadilan Kejaksaan Agung RI, IJRS, Pusham UII-SIGAB

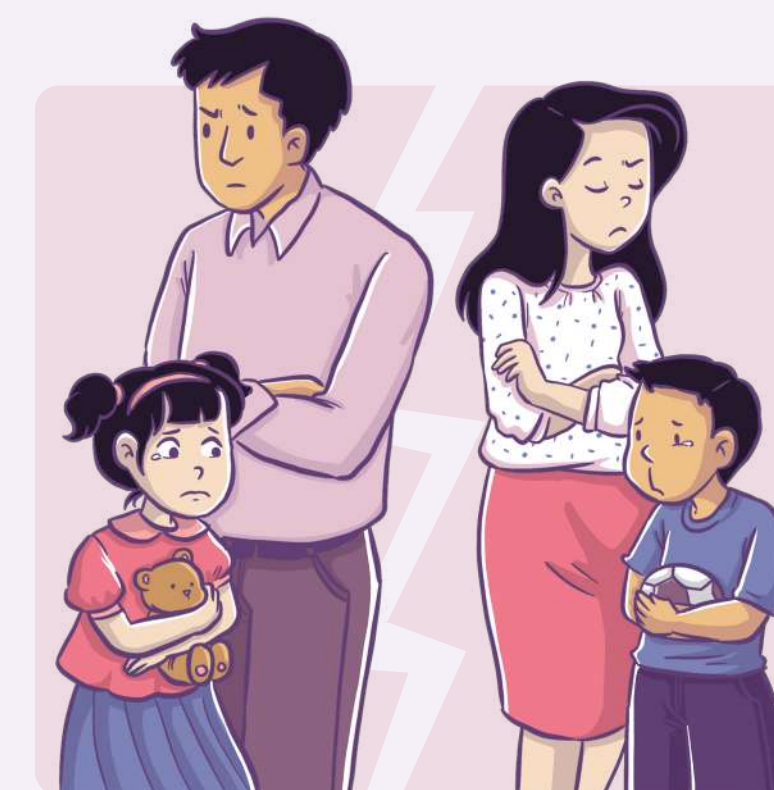
Pedoman Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Peradilan Pidana



Dukungan Keluarga Pasca Perceraian

Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas

Background study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang memuat hak-hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian



Pengembangan Kebijakan Sub Nasional



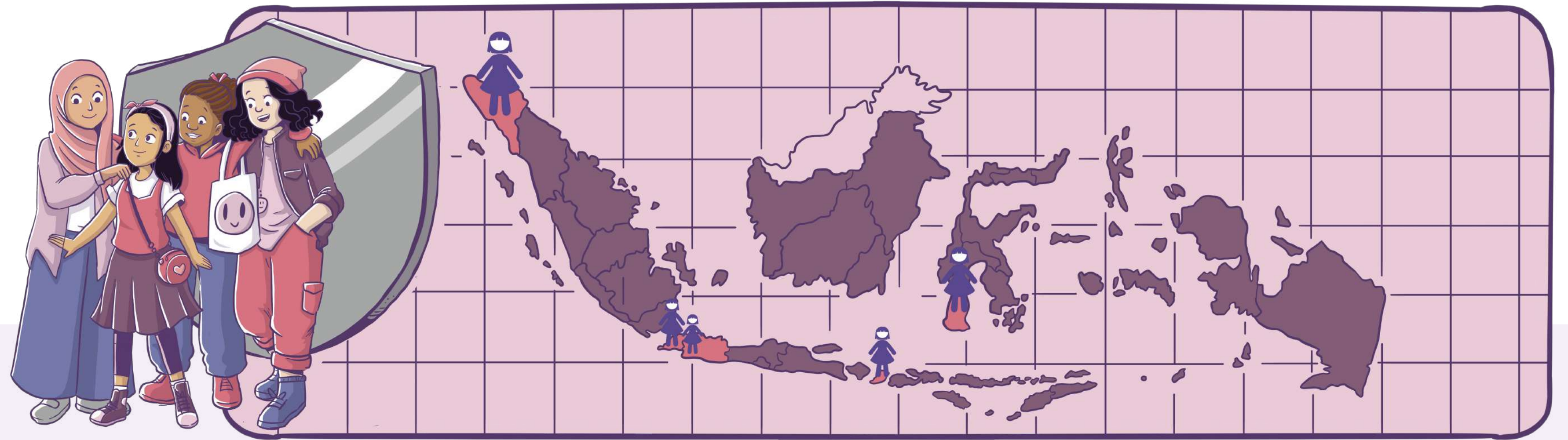
Pencegahan Perkawinan Anak

Yayasan PEKKA, Ditjen Badilag MARI, DPPKBP3A Cianjur, DP3AP2KB Lombok Tengah, DP3A Situbondo

NUSA TENGGARA BARAT

- Draf *awiq-awiq* di 5 desa: Sukarara, Batu Tulis, Gemel, Jelantik dan Puyung di Kecamatan Jonggat, serta Pringgarata di Kecamatan Pringgarata
- Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat
- Draf Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Gemel
- Alokasi anggaran untuk pencegahan perkawinan anak di Desa Gemel, Lombok Tengah

Alokasi dana desa untuk pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Sukarara, pemberian akses kepada paralegal PEKKA sebagai pengguna register *E-Court* Pengadilan Agama



ICJ Makassar, DP3A Makassar, Maros, dan Bone; Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Watampone (Bone)

SULAWESI SELATAN

- Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
- Rancangan *Roadmap* Pencegahan Perkawinan Anak Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

KABUPATEN MAROS

- Keputusan Bupati Maros Nomor 887/KPTS/266/IV/2021 tentang pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak
- Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
- Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 di Desa Majannang
- Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Sambueja
- Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2021 di Desa Bontotallasa
- Peraturan Nomor 1 Tahun 2022 di Desa Pa' benteng, Nomor 2 Tahun 2022 di Desa Tukamasea, Nomor 4 Tahun 2022 di Desa Marannu

KABUPATEN BARRU

Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 21 tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

KABUPATEN BONE

- Surat Edaran Bupati Bone Nomor 188.6/557/IV/PPPA tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- Surat Edaran Bupati Maros Nomor 463/12/DPPPA tentang Pencegahan Terjadinya Perkawinan Usia Anak
- Peraturan Desa Seberang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone
- Memorandum of Understanding* antara Bupati Bone dan 13 Instansi Pemerintah lingkup Kabupaten Bone Nomor 464.2/1107/VI/DPPPA
- Surat Edaran Kepala Desa Ulaweng Cinnong Nomor II/DUC/VI/2023
- Surat Edaran Kepala Desa Cakke Bone Nomor 02/SE-D CB/I/2023
- Surat Edaran Kepala Desa Ulaweng Cinnong Nomor II/DUC/VI/2023

Rumah KitaB, DPPKBP3A Cianjur

DKI JAKARTA

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
- Roadmap* 10 tahun untuk mewujudkan RW 06 Kalibaru Layak Anak

KABUPATEN CIANJUR

- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak

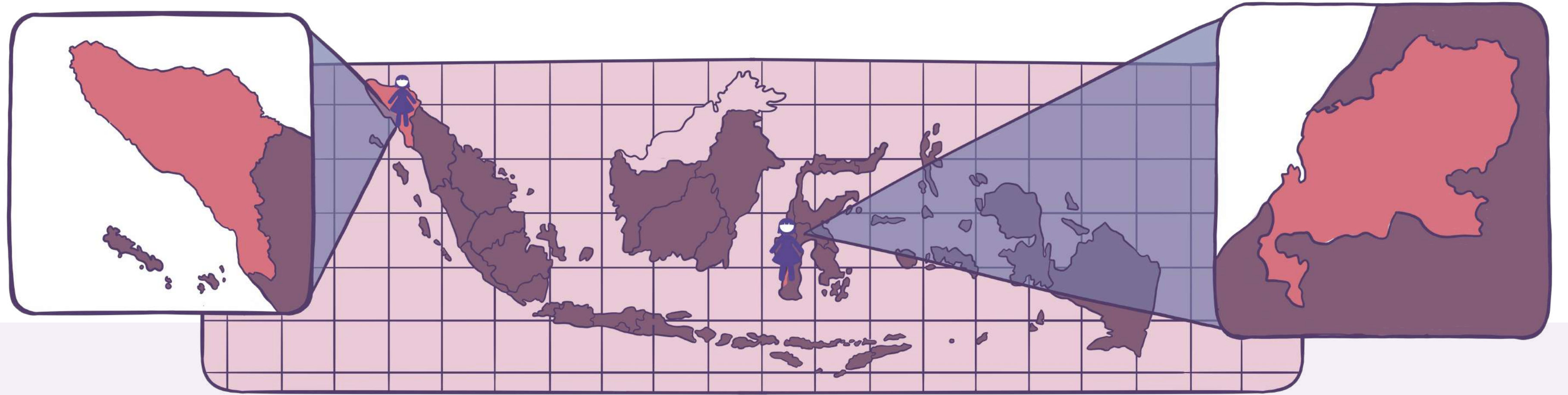
Bappenas, KPPPA, DP3A Aceh, INKLUSI, AIPJ2

ACEH

- Seminar Sosialisasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Aceh
- Draf Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Aceh

KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Pengembangan Kebijakan Sub Nasional



Perempuan Berhadapan dengan Hukum

DP3A Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, Biro Organisasi Setda Aceh, Konsorsium CSO Aceh (PKBI Aceh, RPUK, Sela, Pusat Riset Gender USK)

ACEH

- Naskah Akademis, Daftar Inventarisasi Masalah, Rancangan Revisi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009
- Rancangan Qanun Aceh tentang Pelindungan Hak Perempuan Aceh (sedang berlangsung), bersama tim SKALA dan INKLUSI
- Kertas Kebijakan tentang Pandangan Kritis Perempuan Aceh terhadap Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 (dihasilkan dari Musyawarah Besar Perempuan Aceh untuk Pembangunan)
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.2/1820/2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



ICJ Makassar

MAKASSAR

Penandatanganan *Memorandum of Understanding* pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian bagi aparatur sipil negara oleh pemerintah daerah dan pengadilan agama di Kabupaten Maros dan Bone



Dukungan Keluarga Pasca Perceraian

DP3A Aceh, Biro Hukum Setda Aceh, Badan Kepegawaian Aceh (BKA)

ACEH

Keputusan Gubernur Aceh Nomor 400.2.3/1314/2024 tentang Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Aceh dalam Pemenuhan Hak Anak dan Mantan Istri Pasca Putusan Perkawinan



Implementasi Kebijakan



Pencegahan Perkawinan Anak



Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, IJRS, Rumah KitaB

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019: Buku Saku Panduan bagi Hakim, *E-learning* dan pelatihan daring untuk 500 hakim

Mahkamah Agung Republik Indonesia, KPPPA, Bappenas, BPHN

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia ke Federal Circuit and Family Court of Australia, mengenai pelaksanaan kepentingan terbaik bagi anak dan *independent children lawyer* di Australia | Oktober 2022

KPPPA, AIPJ2

Buku Panduan Pemberian Laporan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Court-to-Court Partnership - FCFCOA, LDP, Ditjen Badilag, KPPPA, Bappenas

1. Webinar mengenai Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu pada masa pandemi Covid-19
2. Diskusi Penanganan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Tinggi Agama Bandung | 26 Juli 2023 dan 22 Februari 2024
3. Diskusi Pencegahan Perkawinan Anak dan Penerapan Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Dispensasi Kawin untuk seluruh Pengadilan Agama di Jawa Timur | 29 September 2023
4. Webinar Penanganan Perkara Dispensasi Kawin dan Pencegahan Perkawinan Anak di Peradilan Agama bersama Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung RI | 27 Juni 2024
5. Webinar Perayaan 20 Tahun Kerjasama Yudisial Mahkamah Agung RI dan Federal Circuit and Family Court of Australia: Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian di Surabaya | 28 Juni 2024

Yayasan PEKKA

1. *Memorandum of Understanding* antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Yayasan PEKKA
2. Diskusi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait registrasi dan akreditasi paralegal
3. Modul Pendidikan untuk paralegal
4. Prosedur Operasional Standar untuk paralegal

Rumah KitaB, KPPPA, UNICEF, PATBM di Jakarta Utara, Cianjur, Kalimantan, KUPI

1. Penyusunan panduan praktis pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak bersama dengan Bappenas, KPPPA, UNICEF dan INKLUSI
2. Halaqah bersama Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menindaklanjuti rekomendasi KUPI tentang perkawinan anak | 2017
3. Satuan Tugas Pencegahan Kawin Kontrak sesuai amanat Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak
4. Jakarta Utara: 3 wilayah yang dideklarasikan menuju layak anak: RW 06 Kalibaru, RW 17 Kriyan Barat, dan Lorong 13 Sukaria
5. Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak di Cirebon, Makassar, dan Jakarta Utara:
 - 86 remaja
 - 110 tokoh formal dan non-formal
 - 97 orang tua dengan anak remaja
6. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas perihal kesehatan reproduksi di 3 wilayah:
 - 70 remaja dari 19 Forum Anak
 - 63 orang tua dari 31 kelurahan/desa
7. Peningkatan kesadaran remaja Muslim tentang kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta
8. Penguatan kapasitas 7 Forum Anak di Kabupaten Cianjur
9. Penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM):
 - Pembangunan 2 PATBM di Jakarta Utara dan Cirebon
 - Advokasi anggaran PATBM dalam Musrembang di Desa Songgom, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur (2022) dan Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon (2023)
 - Penguatan 9 PATBM di Jakarta Utara dan 12 PATBM di Kota Banjarmasin
 - Penguatan kapasitas 31 pengurus dan 8 calon pengurus PATBM di 8 kelurahan
 - Penguatan kapasitas petugas PATBM di Jakarta Utara, Cirebon dan Cianjur
 - PATBM Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara melakukan sosialisasi dengan mengundang perwakilan 7 Kelurahan di Kecamatan Cilincing
 - PATBM Kelurahan Pegambiran Kota Cirebon melakukan sosialisasi PATBM melalui kegiatan rutin di posyandu dan pengajian remaja
 - PATBM Cianjur melakukan sosialisasi PATBM dan pencegahan perkawinan anak di sekolah, Posyandu, dan Pendidikan Anak Usia Dini

ICJ Makassar

1. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Pencegahan Perkawinan Anak di tingkat Provinsi
2. Lokakarya penyusunan sistem koordinasi dan komunikasi bagi anggota forum, yang diikuti oleh 24 anggota Forum Komunikasi dari Kabupaten Bone, Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan
4. Pojok Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar, Maros, dan Watampone (Bone)

Rumah KitaB

Asistensi inisiatif kerjasama Pengadilan Agama Cirebon dan DP3APPKB

Implementasi Kebijakan



Perempuan Berhadapan dengan Hukum

IJRS

1. Indeksasi Putusan Perkara Perceraian dan Kekerasan Seksual | 2016
2. Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017: Buku Saku, Sosialisasi, *e-learning* untuk 500 hakim dari semua lingkungan peradilan
3. Indeksasi Putusan Perkara Kekerasan Seksual | 2023
4. Disparitas Putusan Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Tindak Pidana Perkosaan: Studi Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan Tahun 2019-2021 (Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP) | 2024



Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

IJRS, Pusham UII, SIGAB, Kejaksaan

1. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021: Buku Saku, Bimbingan teknis di Batam dan Makassar
2. Pelatihan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penyusunan Kurikulum dan Modul oleh Badiklat Kejaksaan
3. Pedoman Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan

LBH Apik, Kepolisian Republik Indonesia

1. Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan dalam Penanganan Perempuan, Anak dan Disabilitas di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia
2. Survei kepada 50 perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, 50 sebagai pelaku, 50 pendamping, dan 400 polisi
3. Asesmen kebutuhan di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, NTT, NTB dan Papua, D.I Aceh, Sumatera Utara dan Sulawesi
4. Penyusunan draf naskah kajian tentang penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum di Kepolisian RI dan kertas kebijakan Urgensi Pengaturan Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Kepolisian RI: Refleksi Pendampingan LBH APIK Jakarta | 2020-2023
5. Rancangan Peraturan Kepala Kepolisian RI tentang Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Rumah KitaB

Pelatihan DPPKBP3A Kabupaten Cianjur dalam penanganan kasus kekerasan seksual

ICJ Makassar

1. Penyusunan prosedur operasional standar Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Maros dan Bone
2. Pelatihan bagi Gugus Tugas Desa terkait Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di Maros dan Bone

DP3A Aceh, Konsorsium CSO Aceh (PKBI Aceh, RPuK, SelA, Pusat Riset Gender USK)



Dukungan untuk Penguatan UPTD PPA Aceh

Yayasan PEKKA, Rumah KitaB

Yayasan PEKKA bermitra dengan Rumah KitaB dalam program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk tindak pidana perdagangan orang dan diskusi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Cianjur

Yayasan PEKKA

Diskusi mengenai tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Lombok Tengah dan Situbondo



Dukungan Keluarga Pasca Perceraian

Court-to-Court Partnership - FCFCOA, LDP, Ditjen Badilag, KPPPA, Bappenas

1. Dialog Internasional Pemenuhan Hak Nafkah dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Australia, Indonesia, dan Malaysia | 2 Oktober 2020
2. Dialog Terbatas Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian: Dampaknya bagi Perempuan dan Anak | 22 Desember 2020
3. Webinar Nasional Sosialisasi Gugatan Mandiri dan *E-Court*: Meningkatkan Akses dan Layanan Keadilan bagi Perempuan dan Penyandang Disabilitas | 29 September 2021
4. Dialog Yudisial Indonesia, Australia, dan Malaysia: Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian | 27-28 Juli 2022
5. Kunjungan delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia ke Federal Circuit and Family Court of Australia mengenai pelaksanaan putusan perceraian di Australia | Oktober 2022
6. *Scoping Study* Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Indonesia | 2024

DP3A Aceh, FCFCOA

Seminar Internasional Saatnya Membangun Sistem Dukungan untuk Perempuan dan Anak Terlantar Akibat Perceraian di Aceh | 20 Juli 2020

ICJ Makassar

Riset mengenai konsistensi perkara perceraian di Sulawesi Selatan

Pemantauan Kebijakan



Pencegahan Perkawinan Anak

NASIONAL

Law and Development Partner (Senior Advisor AIPJ2)

Mendukung Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak: Data Kunci Perkawinan, Perkawinan Anak dan Dispensasi Kawin | 2021 dan 2022

AIPJ2, INKLUSI, Bappenas

Monitoring *Dashboard* Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak

Rumah KitaB, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO) Bappenas

Monitoring Pelaksanaan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Direktorat KPAPO Bappenas | 2020-2022

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, AIPJ2, INKLUSI, UNFPA, UNICEF, USAID-ERAT

Monitoring Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan (Makassar dan Maros) | 19-20 September 2023

IJRS dan Yayasan PEKKA

Monitoring dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 di: Surabaya, Bangkalan, Lombok Barat, Lombok Timur, Sukabumi, dan Cianjur

SUB NASIONAL

ICJ Makassar

- Database perkawinan anak untuk Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros
- Buku Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak



Perempuan Berhadapan dengan Hukum

NASIONAL

IJRS, Yayasan PEKKA

Monitoring dan Evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 di: Surabaya, Bangkalan, Lombok Barat, Lombok Timur, Sukabumi, dan Cianjur

SUB NASIONAL

PKBI Aceh, UPTD PPA

Monitoring dan Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh (Kolaborasi DP3A dan RPUK)



Dukungan Keluarga Pasca Perceraian

NASIONAL

Law and Development Partner (Senior Advisor AIPJ2)

Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia



KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Produk Pengetahuan



Pencegahan Perkawinan Anak



Rumah KitaB

Panduan Upaya Memenuhi Kebutuhan Argumentasi Keagamaan dalam Perlindungan Hak Anak Perempuan dari Perkawinan Usia Anak | 2016



Kesaksian Pengantin Bocah | 2017

Fikih Kawin Anak | 2017

Mendobrak Perkawinan Anak | 2018

Maqâshid al-Islâm: Konsep Perlindungan Manusia Perspektif Islam | 2018

Kawan & Lawan Kawin Anak: Catatan Asesmen Program BERDAYA di Empat Daerah | 2018



Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak? | 2020

Studi Pemetaan Situasi Perkawinan Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di 5 daerah (Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Jakarta, Kota Lampung, dan Kab. Pandeglang) | 2021



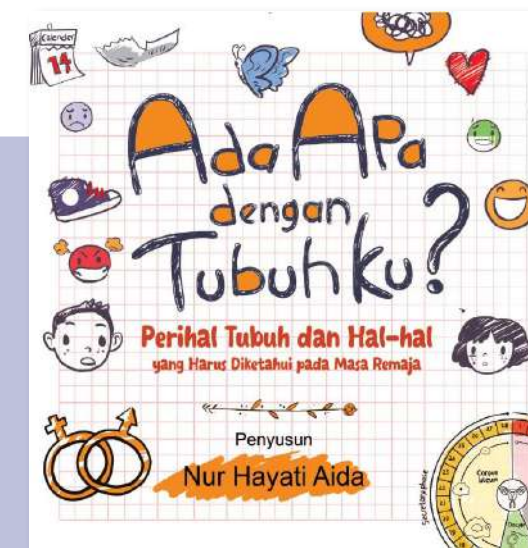
Buku Pengantar: Berdaya Bersama untuk Pencegahan Perkawinan Anak | 2022

Modul 1: Berdaya Melindungi Anak Indonesia (Peningkatan Kapasitas Bersama Pengurus PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak | 2022

Modul 2: Anak Indonesia Berdaya: Pelopor dan Pelapor (Peningkatan Kapasitas Anak dan Kaum Muda Bersama PATBM) untuk Pencegahan Perkawinan Anak | 2022

Maqashid Syariah Lin Nisa: Metode Pembacaan Teks Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan | 2023

Modul Kecakapan Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas bagi Remaja Muslim | 2023



Ada Apa dengan Tubuhku? Perihal Tubuh dan Hal-Hal yang Harus Diketahui pada Masa Remaja | 2023

Buku Saku UKHTI Madrasah dan Pondok Pesantren (Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Pencegahan Perkawinan Anak) | 2023

Rumah KitaB dan IJRS

Infografik: Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak? | 2022

Law and Development Partner

Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia | 2019

ICJ Makassar

Buku Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak | 2019



Film dokumenter pencegahan perkawinan anak | 2019

Leaflet Potret Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan | 2018-2021

Infografik dan video grafis dengan judul "Cerita Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak; Advokasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan | 2021

IJRS



Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin | 2020

Yayasan PEKKA dan *Law, Gender and Society* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Perubahan Pengaturan Usia Minimum Perkawinan, Dispensasi Perkawinan dan Praktiknya di Indonesia | 2021



Youtube Series: Madrasah Keluarga Islam Indonesia (MKMI) | 2021

Yayasan PEKKA

Makalah konseptual tentang Implementasi Putusan Pengadilan Terkait Hak Anak dan Istri dalam Perkara Perceraian | 2022

KEADILAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Produk Pengetahuan



Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Musyawarah Besar Perempuan Aceh untuk Pembangunan

Kertas Kebijakan tentang Pandangan Kritis Perempuan Aceh terhadap Rencana Pembangunan Aceh | 2023-2026

MaPPI FHUI



Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan | 2016

Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan | 2016

Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, dan Realita | 2016

Yayasan PEKKA



Modul Kelas Pendidikan Paralegal Komunitas PEKKA | 2022

IJRS

Indeksasi Putusan Perkara Perceraian dan Kekerasan Seksual | 2016



Buku Saku Akses Keadilan bagi Perempuan & Anak dalam Perkara Pidana: Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 | 2021

Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 - 2020) | 2021

Infografik: Penelitian Fenomena Kekerasan Seksual (Hasil indeksasi putusan pengadilan 2018 - 2020) | 2021

Serial Infografik: Fakta Data Kekerasan Seksual | 2021

Booklet Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021 | 2023



Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Badiklat Kejaksaan Agung | 2023



Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum | 2023



Dukungan Keluarga Pasca Perceraian

Law and Development Partner (Senior Advisor AIPJ2)

Analisis Putusan Perkara Perceraian di Indonesia | 2019

Yayasan PEKKA

Laporan Penelitian tentang Hak Anak dan Istri dalam Kasus Perceraian di 13 Kecamatan | 2022

ICJ Makassar

Leaflet Alur Pelayanan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara - Memastikan Terwujudnya Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak Dalam Tiap Tahapan | 2023

Bappenas

Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian di Indonesia | 2024

DAFTAR SINGKATAN

Ditjen Badilag MARI: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia

DP3A: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP3AP2KB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

DP3APPKB: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

DPPKBP3A: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

IJRS: Indonesia Judicial Research Society

KPPPA: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

MAMPU: Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan

MARI: Mahkamah Agung Republik Indonesia

PATBM: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund

UPTD PPA: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Yayasan PEKKA: Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga

